

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KAPASITAS FISKAL DAN  
PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**Oleh:**

**SISKA MELVIA**  
**2008/ 02661**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2012**

**PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

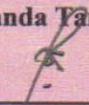
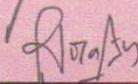
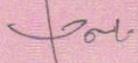
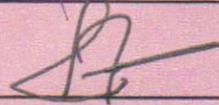
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KAPASITAS FISKAL  
DAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
DI SUMATERA BARAT**

Nama : Siska Melvia  
BP/NIM : 2008/02661  
Keahlian : Perencanaan Pembangunan  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2012

**Tim Penguji**

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. H. Hasdi Aimon, M.Si	
2. Sekretaris	Melti Roza Adry, SE, ME	
3. Anggota	Novya Zulva Riani, SE, M.Si	
4. Anggota	Drs. H. Ali Anis, MS	

dengan ini menyatakan bahwa:

## ABSTRAK

**Siska Melvia 2008/02661 : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapasitas Fiskal dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pembimbing I Bapak Dr. H. Hasdi Aimon, M.Si dan Pembimbing II Ibu Melti Roza Adry, SE. ME**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh Pendapatan Regional (PDRB) dan jumlah penduduk terhadap pajak daerah di Sumatera Barat (2) pengaruh pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat (3) pengaruh PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap Kapasitas Fiskal di Sumatera Barat. Dengan menggunakan data panel yaitu kombinasi 19 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat dari tahun 2007 sampai 2009. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis simultan dengan menggunakan metode *Two Stage Least Square (TSLS)*, pada tingkat kepercayaan 95 % ( $\alpha = 0,05$ ). (1) Uji Heterokedastisitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara parsial PDRB berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah, dan secara bersama-sama PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah di Sumatera Barat Barat ( $\text{sig} = 0,000 < \alpha = 0,05$ ). (2) secara parsial dan bersama-sama pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD di Sumatera Barat ( $\text{sig} = 0,000 < \alpha = 0,05$ ) (3) secara parsial dan bersama-sama PAD dan dana bagi hasil berpengaruh signifikan dan positif terhadap kapasitas fiskal di Sumatera Barat ( $\text{sig} = 0,000 < \alpha = 0,05$ )

Hasil penelitian merekomendasi kepada pemerintah daerah untuk bisa menggali sumber-sumber keuangan daerah terutama penerimaan pendapatan asli daerah tanpa merusak tataran ekonomi daerah, dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah, semua daerah sebaiknya dapat mengelola dengan baik variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kemandirian daerah agar nantinya suatu daerah tidak tergantung lagi kepada transfer pusat.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapasitas Fiskal dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat**”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Dr. H. Hasdi aimon selaku pembimbing I dan juga telah membimbing dan memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Melti Roza adry SE.ME selaku pembimbing II sekaligus penasehat akademis penulis yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu terima kasih juga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. selaku dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberi izin pada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Drs. Alianis M.Si selaku ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu dosen staf pengajar pada Fakultas Ekonomi yang telah memberikan sumbangan pikirannya selama perkuliahan demi terwujudnya skripsi ini.
4. Bapak Kepala Badan Pusat Statistik kota padang yang telah membantu memberikan izin dan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data penelitian ini.
5. Teristimewa kepada ibu dan ayah tercinta serta kaka-kakak ku yang tersayang, yang telah tulus dan ikhlas memberikan dorongan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat–sahabat dan teman–teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya kepada Allah penulis memohon semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang setimpal, Amin....

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca sangat diharapkan. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, Mei 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>...ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>....iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	17

### **BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **DAN HIPOTESIS**

A. Kajian Teori.....	18
1. Konsep Keuangan Pemerintah Daerah .....	18
2. Kapasitas Fiskal ( <i>Fiscal Capacity</i> ).....	20
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	22
4. Pajak Daerah .....	24
B. Penelitian Yang Relevan .....	28
C. Kerangka konseptual.....	30
D. Hipotesis.....	33
E.	

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	35
D. Variabel Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan data.....	36
F. Definisi Operasional .....	36
G. Teknik Analisis Data.....	38

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	46
1. Gambaran Umum Derah Penelitian.....	46
2. Deskripsi Variabel Penelitian.....	50
3. Analisis Induktif .....	71
B. Pembahasan.....	80

### **BAB V. SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	85
B. Saran .....	86

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Perkembangan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2009.....	5
1.2 Perkembangan Kapasitas fiskal, PAD dan DBH Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat tahun 2008-2009.....	8
1.3 Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat tahun 2008-2009.....	11
1.4 Perkembangan Jumlah Penduduk dn PDRB atas harga konstan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2009 .....	13
2.1 Profil Jenis-jenis Pajak Daerah .....	26
2.2 Penelitian Relevan.....	27
3.1 Tabel Uji Identifikasi .....	41
4.1 Daftar Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah.....	47
4.2 Luas Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat.....	48
4.3 Perkembangan PDRB Atas Harga Konstan Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2009 (Milyar Rupiah).....	51
4.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat tahun 2007-2009.....	53
4.5 Perkembangan PAD Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat tahun 2007-2009 .....	55
4.6 Perkembangan Pajak Daerah Kab/Kota di Propinsi Sumatera Barat tahun 2007-2009 .....	58
4.7 Perkembangan Retribusi Kab/Kota di Sumatera Barat tahun 2007-2009.....	60
4.8 Perkembangan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Kab/Kota di Sumatera Barat tahun 2007-2009.....	62
4.9 Perkembangan Lain-Lain PAD Kab/Kota di Sumatera Barat tahun 2007-2009.....	64
4.10 Perkembangan Kapasitas Fiskal Kab/Kota di Sumatera Barat tahun 2007-2009.....	67
4.11 Perkembangan Dana Bagi Hasil Kab/Kota di Sumatera Barat tahun 2007-2009.....	70
4.12 Uji Herokedastisitas Persamaan Pajak Daerah .....	71
4.13 Uji Herokedastisitas Persamaan PAD .....	72
4.14 Uji Herokedastisitas Persamaan Kapasitas Fiskal .....	72
4.15 Hasil Estimasi Persamaan Pajak Daerah.....	73
4.16 Hasil Estimasi Persamaan PAD .....	74
4.17 Hasil Estimasi Persamaan Kapasitas Fiskal .....	76

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

### Halaman

1. Kerangka Konseptual Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapasitas Fiskal dan Penerimaan PAD di Sumatera Barat.....32

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Data Mentah .....
2. Data Dalam Log.....
3. Hasil Uji Heterokedastisitas .....
4. Hasil Regresi
5. Tabel t .....
- Tabel F .....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota telah memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU nomor 22 tahun 1999 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah diikuti oleh UU nomor 25 tahun 1999 (UU-PKPD) tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah yang mengatur aspek desentralisasi fiskal. Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi (otonomi daerah) adalah mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur kepentingan masyarakatnya, dalam merumuskan dan melaksanakan pembangunan berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 32 tahun 2004). Kebijakan desentralisasi dilakukan Pemerintah pusat dengan memberi wewenang yang lebih luas bagi daerah untuk mengelola kapasitas fiskalnya, sekaligus juga menanggung beban-beban yang selama ini menjadi tanggung jawab pusat.

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, mulai dilaksanakan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Menurut Mardiasmo (2002) sejak saat itu, wacana otonomi daerah mengemukakan dengan berbagai dilema baru yang perlu pula memperoleh solusi baru, yang sejalan dengan perkembangan politik dalam era reformasi serta sekaligus sebagai pelaksanaan terhadap UUD 1945 yang didalamnya disebutkan bahwa sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Wacana tersebut memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal.

Dalam perkembangannya kebijakan ini disempurnakan dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang : “Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Adanya kewenangan yang dimiliki ini memberikan konsekuensi adanya tuntutan peningkatan kemandirian daerah (Sidik, 2002). Daerah diharapkan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi (peningkatan kesejahteraan masyarakat). Untuk itu, pemerintah daerah seyogyanya lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal, melakukan alokasi yang lebih efisien pada berbagai potensi lokal yang sesuai dengan kebutuhan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002 dan Wong, 2004). Peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal lebih cepat terwujud dan pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja (kemampuan) keuangan daerah. Hal ini berarti, idealnya pelaksanaan otonomi daerah harus mampu

mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal pembiayaan daerah. (Adi, 2007).

Salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah adalah adanya disparitas (kesenjangan) fiskal antar daerah. Hasil penelitian Nanga tahun 2005 (dalam Adi, 2006) menunjukkan adanya perbedaan kesiapan daerah memasuki era otonomi ini. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah. Kemandirian daerah akan menjadi semakin tinggi seiring dengan meningkatnya kapasitas fiskal daerah.

Mengenai Pemerintah Daerah diatur dalam UUD 1945 yaitu dalam Bab VI yang terdiri dari Pasal 18 , Pasal 18A dan Pasal 18B, dimana dalam pasal 18 ayat (2) menyebutkan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Dengan demikian pemerintah daerah dapat menjalankan pemerintahannya sendiri dan menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang menjadi urusan pemerintah pusat. Selain itu juga pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan pembangunan diseluruh daerah dengan memanfaatkan potensi dan

sumber daya yang tersedia di masing-masing daerah. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Peran otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab ini diharapkan mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah dituntut lebih aktif dalam mengelola dana yang dikuasai secara efektif dan efisien.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. (Josef Riwo Kaho (1997 : 123 ) dalam Sari (2011).

Berbagai sumber penerimaan pemerintah terus digali dan diupayakan guna menunjang pembangunan. Dengan adanya sumber penerimaan, pemerintah daerah dapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan melaksanakan pembangunan berdasarkan prioritas serta tujuan yang akan dicapai.

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, didalamnya menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari: 1). Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terdiri dari:(a). Pajak daerah (b).Retribusi daerah, (c).Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, (d).Lain-lain PAD yang sah. 2). Dana perimbangan, yang terdiri

dari: (a). Dana bagi hasil (b). Dana alokasi umum (c).Dana alokasi khusus  
3).Pinjaman 4).Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**  
**di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2009**  
**(Jutaan Rupiah)**

No	Kabupaten/kota	Tahun			Rata-rata
		2007	2008	2009	
1	Kab. Kep. Mentawai	241,349.41	35,090.94	379,554.93	218,665.09
2	Kab. Pesisir Selatan	496,544.97	612,101.36	614,160.83	574,269.05
3	Kab. Solok	474,783.83	499,483.05	484,951.02	486,405.97
4	Kab. Sijunjung	293,639.83	367,988.99	420,620.90	360,749.91
5	Kab. Tanah Datar	452,694.75	620,664.95	556,304.35	543,221.35
6	Kab. Padang Pariaman	462,283.77	613,087.14	636,449.28	570,606.73
7	Kab. Agam	483,047.52	575,083.42	616,450.98	558,193.97
8	Kab. 50 Kota	435,607.66	594,294.98	534,026.14	521,309.59
9	Kab. Pasaman	357,729.09	409,028.66	446,743.28	404,500.34
10	Kab. Solok Selatan	387,936.82	410,236.78	456,961.39	415,658,79
11	Kab. Dharmasraya	489.653,95	506,852.19	537,425.39	518,427.94
12	Kab.Pasaman Barat	336,742.97	409,219.67	486,938,50	428,895,60
13	Kota. Padang	740,303.25	881,727.53	996,418.37	872,816.38
14	Kota. Solok	230,724.46	288,478.64	300,849.86	273,350.99
15	Kota. Sawahlunto	227,380.03	278,259.41	278,821.48	261,486.97
16	Kota. Padang Panjang	196,536.43	248,443.30	278,779.88	241,253.20
17	Kota. Bukittinggi	278,952.13	290,388.73	346,690.78	305,343.88
18	Kota. Payakumbuh	259,622.62	305,317.47	356,247.34	307,062.48
19	Kota Pariaman	246,528.90	266,139.06	282,992.20	265,220.05
<b>Rata-rata</b>		<b>367,358.04</b>	<b>430,348.60</b>	<b>470,628.85</b>	<b>422,778.50</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (data diolah tahun 2012)

Pada tabel 1, dapat dijelaskan bahwa dari sisi belanja pemerintah daerah cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2007-2009, dimana rata-rata belanja pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat sebesar Rp 422,78 miliar. Berdasarkan Kabupaten/Kota Kep. Mentawai dan Kabupaten Solok serta Kabupaten 50 Kota memperlihatkan penurunan belanja daerah pada tahun 2009. Hal ini

kemungkinan adanya penurunan pendapatan dan penerimaan dari pemerintah pusat, pada dasarnya daerah-daerah yang berada di Indonesia dan tidak terkecuali di daerah di Sumatera Barat, sumber utama dari APBD adalah dana perimbangan dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah (PAD).

Kemudian seluruh daerah menggambarkan peningkatan dari sisi belanja daerah, yang mana daerah yang memiliki total belanja daerah yang tertinggi dimiliki oleh Kota Padang dengan rata-rata belanja daerah sebesar Rp 872,82 miliar, hal ini kemungkinan disebabkan oleh peranan dan fungsi Kota Padang yang merupakan ibu Kota Propinsi dengan jumlah penduduk yang banyak, penyediaan infrastruktur yang baik dan memadai. Pada urutan kedua dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki rata-rata belanja daerah sebesar Rp 574,27 miliar yang tertinggi setelah Kota Padang. Hal yang menarik disini adalah Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki rata-rata belanja daerah yang tertinggi setelah Kota Padang.

Salah satu sumber penerimaan daerah adalah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD. Sedangkan untuk Dana Perimbangan, komponen Bagi Hasil Pajak serta komponen Bagi Hasil Bukan Pajak

dan Bantuan Keuangan Provinsi adalah 2 unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh nantinya.

Sumatera Barat sebagai propinsi yang memiliki 19 kabupaten / kota, tentunya juga melaksanakan kebijakan otonomi daerah. Berdasarkan prinsip dalam kebijakan ekonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan tugas dan kewenangannya.

Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dan tercapai Kapasitas fiskal yang lebih baik, tiap daerah tidak tergantung lagi kepada transfer pemerintah pusat dimana salah satu sumber keuangan daerah berasal dari PAD, didefinisikan sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004).

Meskipun telah memasuki era otonomi daerah, ternyata bukan kemandirian daerah yang terwujud melainkan ketergantungan kepada pemerintah pusat, pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, seharusnya menjadi faktor utama dalam meningkatkan keuangan daerah, namun ternyata propinsi Sumatera Barat masih memiliki PAD yang lebih kecil dari dana perimbangan dimana pada tahun

2009 tercatat sekitar 39,02% berasal dari dana perimbangan dan 36,51% berasal dari PAD (BPS Sumatera Barat).

Kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan daerah, pada tabel 1.2 dibawah ini terlihat bahwa dari 19 kab/kota di Sumatera Barat pada tahun 2008-2009 hampir dari sebagian kab/kota kapasitasnya meningkat hanya sebagian kab/kota yang mengalami penurunan kapasitas fiskal seperti kab Mentawai yang turun sebesar 17,52%, kab. Solok, kab. Lima Puluh Kota dan juga kota Padang dan Pariaman, penurunan kapasitas fiskal kota padang dan pariaman di sebabkan oleh menurunnya PAD yaitu kota Padang sebesar 3,80% dan kota Pariaman sebesar 8,08%.

Pendapatan asli daerah disetiap kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2008-2009 rata-rata mengalami peningkatan, peningkatan PAD tersebut juga berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah, namun sebagian dari kab/kota di Sumatera Barat yang peningkatan PAD, tidak berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas fiskal seperti Kab Mentawai, Kab Solok, Kab Pasaman dan Solok Selatan. Pertumbuhan PAD Kabupaten Mentawai dari tahun 2008-2009 sebesar 15,62% namun kapasitas fiskal nya menurun sebesar -17,52%, sedangkan kabupaten Pasaman dimana pertumbuhan PAD nya menurun sebesar -3,35 dan kapasitas fiskal nya naik sebesar 7,30%. Ini terlihat bahwa walaupun hampir sebagian dari kab/kota di Sumatera Barat yang rata-rata PAD nya meningkat dari tahun 2008-2009 namun kontribusi PAD terhadap kapasitas fiskal masih rendah, karena disebabkan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dari pusat seperti Ba

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak dan Kapasitas Fiskal**  
**Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2008-2009 dalam (Ribu Rupiah)**

Daerah	PAD		Pert(%)	Bagi Hasil Pajak/bukan pajak		Pert(%)	Kapasitas Fiskal		Pert(%)
	2008	2009		2008	2009		2008	2009	
Mentawai	25,243,86	29,188,116	15.62	34,905,665	25,283,470	-27.50	67.693.582	55.833.228	-17.52
Pesisir selatan	16,377,994	17,514,448	6.94	25,123,885	28,083,282	11.78	57.052.822	58.684.593	2.86
Kabupaten Solok	18,373,100	19,806,290	7.80	22,414,796	22,888,030	2.11	58.188.490	56.279.341	-3.28
Sijunjung	24,423,791	25,982,270	6.38	18,511,398	19,434,185	4.98	54.989.911	61.768.942	12.33
Tanah Datar	32,084,222	36,543,147	13.89	19,056,547	19,773,506	3.76	63.422.939	70.597.764	11.31
Padang Pariaman	23,813,876	22,880,889	-3.92	48,982,421	20,417,742	-58.31	56.028.899	57.356.664	2.37
Agam	24,180,990	25,956,304	7.34	22,146,458	21,265,207	-3.97	60.495.092	68.409.601	13.08
Lima Puluh Kota	20,738,935	11,307,396	-45.79	22,607,621	21,109,277	-6.63	57.038.433	48.441.336	-15.07
Pasaman	16,265,565	15,721,240	-3.35	21,234,513	23,108,628	8.83	49.230.767	52.824.628	7.30
Solok Selatan	12,008,338	11,989,380	-9.10	23,524,409	23,951,245	1.81	47.915.024	49.656.631	3.63
Dharmasraya	21,562,523	25,120,058	16.50	27,157,819	22,212,454	-18.23	60.421.873	61.292.766	1.44
Pasaman Barat	19,755,964	23,457,517	18.74	26,496,348	27,123,227	2.37	59.634.530	66.324.126	11.21
Padang	117,728,886	113,318,441	-3.80	58,870,431	58,882,838	0.02	212.621.924	211.426.003	-0.56
Solok	21,664,596	23,831,125	10.09	17,253,432	17,618,238	2.11	45.650.838	49.497.547	8.43
Sawahlunto	23,441,989	26,532,986	13.19	15,213,305	24,141,993	58.69	44.672.036	57.678.280	29.11
Padang Panjang	13,457,506	22,581,303	67.80	17,212,198	17,190,571	-0.13	36.073.714	46.050.892	27.66
Bukittinggi	33,828,542	38,891,935	14.97	17,409,970	18,956,608	8.88	58.350.460	65.310.064	11.93
Payakumbuh	31,491,006	32,555,381	3.38	16,374,202	16,840,705	2.85	55.077.540	57.863.741	5.06
Pariaman	13,341,784	12,263,181	-8.08	16,240,444	19,197,116	18.21	38.496.749	38.450.776	-0.12

*Sumber : Sumbar Dalam Angka dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kab/kota Sumbar , BPS Sumatra Barat*

Banyak penelitian terdahulu menunjukkan suatu fakta yang sangat memprihatinkan yaitu hampir di semua daerah di Indonesia rasio DAU terhadap Total Pendapatan Daerah melebihi angka 50%. Seharusnya di era otonomi daerah ini yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan keuangan daerah yaitu yang bersumber dari PAD yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Penyebab utama ketergantungan fiskal di Indonesia terutama di daerah tingkat II adalah 1) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah; 2) tingginya derajat desentralisasi dalam bidang perpajakan ; 3) kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang di andalkan sebagai sumber penerimaan; 4) adanya kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi maka cenderung terjadinya disintegrasi dan separatisme. ( Kuncoro et.al 2004:15).

Seharusnya Pendapatan Asli daerah dapat di jadikan sebagai sumber penerimaan daerah yang utama, dimana beberapa faktor kunci penopang PAD adalah: Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah pada dewasa ini masing-masing daerah dituntut harus mampu berusaha untuk meningkatkan pendapatannya, maka penggalan potensi ekonomi daerah dan penggunaan potensi yang tepat adalah jalan terbaik, karena tanpa memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh masing masing daerah serta tanpa pengembangan pembangunan dan pendapatan daerah

tidak akan mencapai hasil yang optimal atau sesuai dengan yang diharapkan. Potensi ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber kehidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Suparmoko, 2002 : 58)

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah adalah faktor utama dari penerimaan PAD, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah, namun terlihat pada tabel 2 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah belum bisa dijadikan faktor utama dalam penerimaan pendapatan asli daerah walaupun hampir di seluruh kab/kota di Sumatera Barat peningkatan pajak daerah juga berpengaruh terhadap peningkatan PAD seperti Kota Padang panjang yang peningkatan pajak daerah nya dari tahun 2008-2009 cukup tinggi yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp. 13.457.50 juta menjadi Rp. 22.581.30 juta pada tahun 2009 atau sebesar 67,80%, namun kontribusi Pajak terhadap PAD masih rendah, begitu juga halnya dengan Hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain PAD yang sah, namun kontribusi lain-lain PAD yang sah cukup tinggi terhadap PAD, begitu juga dengan retribusi, penurunan atau peningkatan retribusi tidak terlalu berpengaruh terhadap PAD seperti kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, kota Solok dan Kota payakumbuh yang mana retribusi daerahnya menurun namun PAD nya tetap meningkat. Seharusnya pajak daerah dan retribusi daerah bisa di andalkan sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang paling besar

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kab/Kota Sumatera Barat**  
**Menurut Jenis Penerimaan Tahun 2008-2009 (dalam juta Rp)**

Daerah Kab/Kota	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Hasil Perusahaan Milik daerah		Lain-lain PAD yang sah	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Mentawai	285,56	357,316	2,00,934	2,301,214	7,745,156	8,305,891	17,210,201	18,223,696
Pessel	4,920,760	4,007,714	3,822,704	3,762,782	1,718,642	2,146,892	6,743,886	7,597,060
Kab. Solok	3,604,923	3,693,853	4,348,146	3,839,764	2,414,781	2,532,926	8,005,248	9,739,747
Sijunjung	3,077,474	2,910,592	4,601,478	4,229,506	3,562,220	4,637,762	13,182,167	14,204,410
Tanah Datar	3,926,603	3,404,091	4,474,972	2,785,393	9,021,295	2,998,390	14,661,351	19,355,273
PdgPariaman	6,542,628	5,261,801	1,725,399	2,266,281	1,98,643	2,277,040	13,587,206	13,075,768
Agam	5,272,620	7,184,728	5,304,039	6,038,728	2,557,454	3,062,021	11,046,876	9,671,074
50 Kota	3,656,746	1,720,456	4,385,466	3,449,075	1,747,706	1,783,654	10,948,999	4,354,208
Pasaman	3,127,008	2,723,263	3,011,985	3,501,395	1,991,374	2,710,209	8,135,196	6,786,373
Solsel	1,665,251	1,400,835	1,242,088	1,559,039	2,220,110	2,893,415	6,880,887	6,136,091
Dharmasraya	4,310,614	4,400,867	3,476,703	6,906,584	260,214	2,736,035	13,551,441	11,076,573
PasamBarat	4,410,695	4,902,140	4,212,261	5,883,882	0	391,392	11,133,008	12,280,163
Padang	76,795,691	71,666,752	24,793,292	21,898,305	3,788,864	4,741,733	12,351,037	15,011,620
Solok	1,387,050	1,330,478	3,059,285	2,633,617	2,446,070	3,347,638	14,752,189	16,519,393
Sawahlunto	1,535,694	1,595,547	13,611,889	13,891,964	2,835,566	3,036,898	5,458,840	8,008,577
Pdg Panjang	1,499,659	2,268,061	4,261,024	11,940,450	1,597,438	1,986,512	6,009,385	6,386,280
Bukittinggi	8,690,766	10,336,714	9,851,572	11,048,263	1,0844,306	1,374,582	14,201,897	16,132,376
Payakumbuh	2,005,634	2,912,433	17,032,684	6,456,756	3,497,296	3,973,575	8,955,391	19,212,435
Pariaman	1,650,855	1,298,100	1,276,232	1,433,899	1,785,518	2,139,082	8,629,177	7,392,101

Sumber :*Sumbar Dalam Angka dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kab/kota Sumbar , BPS Sumatera barat*

Melihat kondisi sumber penerimaan masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Barat ternyata Pendapatan Asli Daerah (pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah) belum bisa diharapkan untuk dijadikan tumpuan dalam mencukupi kebutuhan dana untuk pengeluaran daerah. Untuk menghindari persoalan dalam era desentralisasi pada masa mendatang Pemerintah Daerah tiap-tiap kab/kota di Sumatera Barat perlu melakukan upaya-upaya yang serius dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari PAD. Seperti Pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung. Dimana pajak daerah itu sendiri dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, jumlah penduduk dan pajak tahun sebelumnya, begitu juga dengan retribusi daerah, dimana retribusi daerah adalah pungutan langsung daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jumlah penduduk adalah penduduk yang telah bekerja. Penduduk berarti memiliki pendapatan sedangkan pendapatan telah diterima secara luas sebagai ukuran untuk menentukan kemampuan membayar pajak.

Selain jumlah penduduk, pendapatan regional mempengaruhi pajak daerah, jika pendapatan regional meningkat maka pendapatan perkapita akan meningkat

yang nanti nya akan berdampak kepada peningkatan pajak daerah, karena pendapatan adalah ukuran dari kemampuan seseorang dalam membayar pajak,

Pajak kab/kota terdiri dari pajak Hotel, Pajak restoran, pajak Reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir. Pada Tabel 1.4 dibawah terlihat bahwa jumlah penduduk sangat mempengaruhi pajak daerah, dimana jumlah penduduk dari tahun 2008-2009 di setiap kab/kota di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan,

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan**  
**Menurut kab/kota Sumatera Barat Tahun 2008-2009**

Daerah Kab/kota	Jumlah Penduduk			PDRB (Milyar Rupiah)		
	2008	2009	Pert (%)	2008	2009	Pert (%)
Mentawai	68097	68964	1.27	486,66	509,40	4.69
Pesisir selatan	442257	448488	1.40	1.899,03	2.000,22	5.33
Kab. Solok	355705	359819	1.15	1.926,83	2.047,62	6.27
Sijunjung	202275	206982	2.32	1.205,70	1,273,14	5.59
Tanah Datar	335926	336604	0.20	2.331,75	2.468,74	5.87
Padang Pariaman	387195	389735	0.65	2.645,12	2.749,34	3.94
Agam	429822	431153	0.30	2.792,79	2.929,87	4.91
Lima Puluh Kota	331771	333921	0.64	2.545,80	2.684,58	5.45
Pasaman	257374	261579	1.63	1.214,88	1.289,26	6.12
Solok Selatan	132093	133804	1.29	579,48	614,81	6.10
Dharmasraya	180915	338567	87.14	1.020,08	1.088,11	6.67
Pasaman Barat	333192	675584	102.78	2.394,93	2.544,86	6.26
Padang	856815	59837	-93.01	10.797,26	11.345,64	5.08
Solok	58473	59837	2.33	473,69	447,62	-5.50
Sawahlunto	54037	54685	1.19	474,38	494,39	4.22
Padang Panjang	54218	56491	4.19	373,25	346,82	-7.08
Bukittinggi	106045	107805	1.65	918,91	969,59	5.52

Payakumbuh	105994	106911	0.86	774,49	818,07	5.63
Pariaman	70625	70726	0.14	656,27	685,63	4.47

Sumber : Sumatera Barat dalam Angka 2009-2010

Rendahnya penerimaan pajak daerah dapat dikarenakan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak, kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah dan biaya pungutan yang masih tinggi. Seperti kabupaten Sijunjung yang jumlah penduduknya meningkat sebesar 2,33% namun penerimaan pajak daerahnya menurun sebesar 5,24% , begitu juga halnya dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto, dimana setiap Kab/Kota di Sumatera Barat dari Tahun 2008-2009 PDRB mengalami peningkatan, peningkatan PDRB tidak mencerminkan terhadap peningkatan pajak, seperti Kabupaten Pasaman dimana PDRB meningkat sebesar 6,12% dan jumlah penduduk juga meningkat sebesar 102,76% namun penerimaan pajak menurun sebesar 6,67 % dan juga kota Pariaman dimana PDRBnya meningkat sebesar 4,47% namun penerimaan pajak menurun sebesar 21,36 % , kemungkinan hal tersebut terjadi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, masih sulitnya memungut pajak dan rendahnya kemampuan dalam membayar pajak.

Namun di cermati, bahwa ternyata di era otonomi daerah justru bukan kemandirian daerah yang terwujud, melainkan ketergantungan daerah yang makin besar kepada Pusat,Seharusnya PAD yang bersumber dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lai-lain PAD dapat di andalkan dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah.Berdasarkan latar belakang

permasalahan itulah kemudian pemerintah bersama berbagai *stakeholders* lainnya merasa terpanggil untuk mencari suatu solusi yang tepat di dalam peningkatan keuangan daerah agar terwujudnya kemandirian ekonomi daerah sejalan dengan nafas otonomi dan desentralisasi. Diharapkan nantinya daerah menjadi lebih tahu bagaimana cara mereka untuk mengembangkan diri dalam meningkatkan keuangan daerah terutama yang bersumber dari PAD dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat. Oleh sebab itu saya tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi saya yang berjudul : “ **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas Fiskal dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat.**”

### **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap kapasitas fiskal di Sumatera Barat?
2. Seberapa besar pengaruh Pajak daerah, retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah terhadap PAD di Sumatera Barat?
3. Sejauhmana pengaruh pendapatan regional dan jumlah penduduk terhadap Pajak daerah di Sumatera Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap kapasitas fiskal di Sumatera Barat.
2. Untuk melihat besarnya pengaruh Pajak daerah, retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah terhadap PAD di Sumatera Barat.
3. Untuk melihat pengaruh jumlah penduduk dan Pendapatan regional terhadap Pajak daerah di Sumatera Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap hasil penelitian yang didapatkan bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Negeri Padang.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Sumatera Barat yaitu Departemen Keuangan dalam meningkatkan keuangan daerah agar terciptakan kemandirian ekonomi daerah..
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan keuangan daerah khususnya Kapasitas Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah agar terciptakan kemandirian ekonomi daerah dalam era otonomi.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Konsep Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 maka berbagai prinsip dasar yang ada dalam Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kembali dipertegas dan menjadi acuan dalam pengalihan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi tiga tahapan yaitu: Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan serta Pertanggung jawaban.

Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang No.32 tahun 2004 bahwa “ kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan tanggung jawab keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi”.

Dwirandra (Dalam Halim 2004:167) menemukan pengertian kemandirian keuangan daerah sebagai berikut :

“kemandirian keuangan daerah diartikan daerah memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahnya”

Menurut Halim (2004 : 232) “kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah di bandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman”.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Selanjutnya pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya. Halim (2004: 24).

Berdasarkan pengertian tersebut pada prinsipnya keuangan daerah mengandung unsur pokok, yaitu:

1. Hak Daerah yang dapat dinilai.
2. Kewajiban Daerah dengan uang.
3. Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

## **2. Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*)**

Menurut Haryanto (2005), kapasitas fiskal merupakan suatu komponen yang masuk di dalam formula penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU

itu sendiri adalah salah satu komponen di dalam Dana Perimbangan di APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas formula dengan konsep Kesenjangan Fiskal (*Fiscal Gap*) yang merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal (*Fiscal Need*) dengan Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*).

Di Kanada, salah satu jenis bantuan yang mirip dengan DAU adalah bantuan program untuk pemerataan (*Canadian equalization program*). Bantuan ini bersifat umum dan tidak mengikat (*unconditional block grant*) dan ditujukan untuk mendukung dicapainya suatu tingkat pelayanan publik tertentu sesuai dengan kemampuan daerah. Dengan demikian, model alokasi dana ini memberikan penekanan atas pentingnya kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) suatu daerah sebagai pencerminan kemandirian daerah. (Brodjonegoro *et al*, 1999) dalam Hervyra (2010)

DAU bertujuan sebagai instrumen untuk mengatasi masalah *horizontal imbalances* yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah (*block grants*). Konsep dasar formulasi DAU sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 1999 itu secara implisit merupakan penjabaran dari teori *governmental transfer* yang berbasis pada konsepsi *fiscal gap*. Dengan konsepsi *fiscal gap*, nantinya kesenjangan fiskal yang merupakan selisih negatif antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal dianggap sebagai kebutuhan yang harus ditutup melalui transfer Pemerintah Pusat.

Ide dasar dari DAU ini adalah untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal relatif lebih besar dibanding kebutuhan fiskalnya, maka DAU yang dialokasikan

seyogyanya tidak terlalu besar. Sebaliknya daerah yang memiliki kebutuhan fiskal relatif lebih tinggi terhadap kapasitas fiskalnya, membutuhkan DAU yang relatif besar pula agar mereka tetap dapat menyediakan pelayanan dasar yang cukup baik.

Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10 disebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah (*capital investment*) atau Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah antara lain berasal dari PAD dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Dana Perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil baik pajak maupun non pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Kuncoro ( 2004:33) Kapasitas Fiskal (KpF) dapat ditentukan yakni :

$$\mathbf{KpF=PAD\ estimasi + (PBB + BPHTB + PPh + SDA).....(1)}$$

Keterangan :

- PAD : Pendapatan Asli Daerah Estimasi
- PBB : Pajak Bumi dan Bangunan
- BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- PPh : Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pasal 21
- SDA : Sumber Daya Alam

Sedangkan nilai estimasi PAD menggunakan model ekonometrika sederhana, dengan formula :

$$\mathbf{PAD\ estimasi = \alpha_0 + \alpha_1 PDRB_{jasa}}$$

### **3. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak, retribusi daerah, bagian laba

BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Kemampuan daerah dalam membiayai sendiri pembanguann daerahnya masih mengalami kendala berupa rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Indikator rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dapat dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin (IKR) yang diperoleh dari besarnya perubahan PAD terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase pada tahun yang sama (Radianto, 1997).

Untuk mencapai kemandirian daerah, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi daerahnya. Potensi pendapatan asli daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa variable yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan yang dapat mempengaruhi penerimaan PAD. Beberapa variabel yang perlu di analisis untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD menurut Simanjuntak dalam Halim ( 2002:97) adalah :

- a. Kondisi awal suatu daerah, keadaan struktur ekonomi dan sosial daerah sangatlah menentukan besar kecilnya keinginan pemerintah untuk menetapkan pungutan. serta kemampuan untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.kondisi awal suatu daerah yang perlu di perhatikan seperti komposisi industri yang ada didaerah, struktur social politik dan institusional.
- b. Peningkatan cakupan atau eksternalitas dan ekstensifikasi penerimaan PAD. Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan PAD.
- c. Tingkat inflasi, inflasi akan meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan omzet penjualan misalnya, pajak hotel dan restoran.

- d. Penyesuaian tarif, peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif yang perlu mempertimbangkan laju inflasi. Kegagalan untuk penyesuaian tarif dengan laju inflasi akan menghambat pendapatan PAD.
- e. Sumber pendapatan baru, adanya kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan penambahan subjek pajak dan retribusi yang telah ada.

Menurut Widayat dalam Tarigan (2005) faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya PAD pemerintah kabupaten/kota antara lain :

1. Banyak sumber pendapatan kabupaten/kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan
2. BUMD belum banyak bisa memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan liar.
4. Adanya kebocoran-kebocoran
5. Biaya pungut yang masih tinggi
6. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan.
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Menurut Mardiasmo (2002:132), “pendapatan asli daerah adalah penerimaa yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 bahwa Pendapatan asli Daerah (PAD) bersumber dari :

1. Pajak daerah (TAX)
2. Retribusi daerah (R)
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (PROFT)

#### 4. Lain-lain PAD yang sah (OTHS)

Secara matematika, Pendapatan Asli Daerah dapat diformulasikan sebagai beriku Bambang dkk, 2003 (dalam Nurjanna, 2008) :

$$\text{PAD} = \text{TAX} + \text{R} + \text{PROFT} + \text{OTHS} \dots \dots \dots (2)$$

#### 4. Pajak Daerah

Pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak oleh pemerintah dengan balas jasa yang tidak langsung dapat ditunjuk. Pada pokoknya pajak memiliki dua peranan utama yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budget) dan sebagai alat untuk mengatur (fungsi regulator) (Suparmoko, 2002). Mardiasmo (1997) mendefinisikan pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah tersebut.

Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan teori perpajakan, Musgrave and Musgrave (1999); besar kecilnya penerimaan di sektor pajak akan sangat ditentukan oleh : (1) pendapatan perkapita, (2) jumlah penduduk, baik pusat maupun daerah, Apabila pola konsumsi bagi perekonomian secara keseluruhan akan terjadi, yang akan berakibat pada penerimaan pajak. Jadi pendapatan perkapita berpengaruh

(+)/positif terhadap penerimaan pajak daerah. Begitu pula dengan jumlah penduduk, disini dibatasi dengan jumlah penduduk yang bekerja. Penduduk berarti memiliki pendapatan sedangkan pendapatan telah diterima secara luas sebagai ukuran untuk menentukan kemampuan membayar pajak.

Menurut Mangkoesobroto dalam Sutrisno (1998:217) pendapatan menggambarkan ukuran kemampuan seseorang dalam membayar pajak, sedangkan besar kecilnya penerimaan pajak sangat ditentukan oleh pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Saragih (2003:68) menjelaskan bahwa sumber utama PAD adalah pajak dan retribusi daerah, pajak dan retribusi sangat dipengaruhi oleh intensitas perekonomian daerah yang diidikasikan dari tingkat PDRB suatu daerah, semakin berkembang kegiatan ekonomi disuatu daerah maka semakin besar potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut, dengan berkembang nya ekonomi daerah, maka akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak dan retribusi.

Pengaruh PDRB terhadap pajak dapat di gambarkan dengan formula

$$\mathbf{T = aY^n} \dots\dots\dots (3)$$

(Mc.Grow Hill dalam Hendriawan 2002:31)

Dari teori yang telah di kemukakan oleh beberapa ahli diatas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pajak antara lain jumlah penduduk, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan kebijakan pemerintah,

Terdapat banyak batasan tentang pajak yang dikemukakan para ahli, tetapi pada dasarnya isinya hampir sama yaitu pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa imbalan jasa yang secara langsung dapat ditunjuk (Suparmoko, 1997). Dari batasan atau definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah :

1. Iuran masyarakat kepada negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa balas jasa secara langsung
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah

**Tabel 2.1**  
**Profil jenis - jenis pajak Daerah**

No	JENIS PAJAK	OBJEK PAJAK	SUBJEK PAJAK	WAJIB PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK
1.	Pajak Hotel	Pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran	Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel	Pengusaha hotel	Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel
2.	Pajak restoran	Pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran	Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran	Pengusaha restoran	Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran
3.	Pajak reklame	Semua penyelenggaraan reklame	Orang pribadi atau badan yang penyelenggaraan atau melakukan pemesanan reklame	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame	Nilai sewa reklame
4	Pajak hiburan	Penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran	Orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan	Orang pribadi/badan yang menyelenggarakan hiburan	Jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayar untk menikmati hiburan
5.	Pajak penerangan jalan	Pengguna tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah	Orang pribadi atau badan yang menggunakan listrik	Orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik/pengguna listrik	Nilai jual tenaga listrik
6	Pajak parkir	Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usah, dan penitipan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran	Orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir	Jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayar untuk pemakaian tempat parker

Sumber : PP No.65 tahun 2001

## B. Penelitian Relevan

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Haryanto (2005), Dengan penelitiannya yang berjudul kemandirian daerah menggunakan metode path analisis	Kapasitas Fiskal Pajak Daerah Retribusi Daerah PDRB jasa dan BHP	Pajak Daerah dan Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal, sedangkan retribusi daerah dan PDRB j tidak berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal daerah.
2	Fajrin (2008), Dalam penelitiannya tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah di Indonesia	Kapasitas Fiskal Pajak Daerah Retribusi Daerah PDRB Bagi Hasil Pajak	Pajak Daerah dan Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal, sedangkan retribusi daerah dan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal
3	Hervyra (2010) Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian daerah di Sumatera Barat	Kapasitas Fiskal PAD Bagi hasil Pajak (BHP) PDRB	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi hasil pajak (BHP) berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal, sedangkan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal.
4	Keriahen (2005) Pengaruh Otonomi Daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan sector-sektor berpotensi yang dapat dikembangkan di pemerintahan medan	Otonomi daerah Pajak daerah Retribusi Laba BUMD Lain-lain PAD	Secara parsial dan bersama – sama Variabel Otonomi daerah, pajak, retribusi, laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap PAD
4	Sari (2011) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Gresik.	Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil penelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain yang sah	Pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mempunyai pengaruh yang signifikan.

5.	Wantara (1997) Analisis pendapatan Asli daerah dan bantuan pemerintah pusat di daerah Istimewa Yogyakarta	Pajak Daerah Inflasi PDRB perkapita Jumlah kendaraan bermotor Jumlah wisatawan	Jumlah kendaraan bermotor dan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pajak dengan alpha 5% sedangkan inflasi dan pendapatan perkapita tidak berpengaruh signifikan pada alpha 5%
6	Jaka (1999) Hubungan keuangan pusat daerah, reformasi perpajakan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah(27 propinsi)	Pajak Pendapatan perkapita Jumlah penduduk	Pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap pajak, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah teknik analisis, dimana disini peneliti menggunakan analisis simultan dan waktu maupun tempat penelitian juga berbeda dari peneliti sebelumnya.

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variable yang diteliti berdasarkan teori yang telah dikemukakan dan rumusan masalah. Keterpautan maupun hubungan antara variable yang diteliti diuraikan dengan berpijak pada kajian teori.

Dalam melakukan penelitian yang berjudul “**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapasitas Fiskal dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat**”, dipakai beberapa variabel, yang terdiri dari tiga variabel endogen yaitu Kapasitas Fiskal ( $Y_3$ ), Pendapatan Asli Daerah ( $Y_2$ ), Pajak ( $Y_1$ ), serta enam variable eksogen yaitu Pendapatan ( $X_1$ ), jumlah penduduk ( $X_2$ ), Retribusi ( $X_3$ ), hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan ( $X_4$ ), lain-lain PAD yang sah ( $X_5$ ), dan Dana Bagi Hasil ( $X_6$ ).

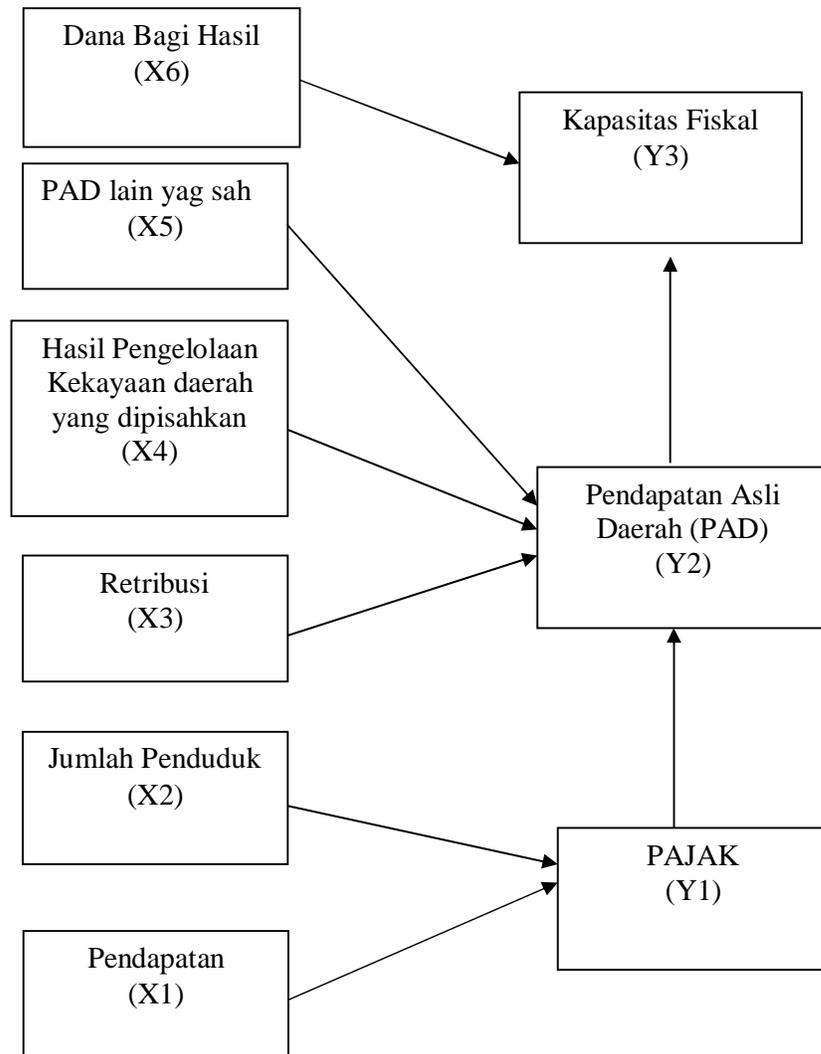
Penelitian ini mencoba untuk melihat pengaruh variabel eksogen yaitu Pendapatan ( $X_1$ ) dan pengaruh jumlah penduduk ( $X_2$ ), dan terhadap pajak daerah ( $Y_1$ ) sebagai variabel endogen. pengaruh Pajak daerah ( $Y_1$ ), Retribusi ( $X_3$ ), hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan ( $X_4$ ), lain-lain PAD yang sah ( $X_5$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah ( $Y_2$ ) bagi hasil pajak ( $X_6$ ) dan Pendapatan Asli Daerah ( $Y_2$ ) terhadap Kapasitas Fiskal ( $Y_3$ ).

Dana Bagi hasil baik dana bagi hasil pajak/bukan pajak berpengaruh positif terhadap kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal), dimana bagi hasil termasuk didalam dana perimbangan, semakin tinggi Bagi hasil maka kapasitas fiskal suatu daerah juga akan meningkat.

Pendapatan asli daerah (PAD) juga berpengaruh terhadap kapasitas fiskal, kenaikan PAD akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah berarti daerah tersebut dapat meningkatkan keuangan dimana dengan meningkatnya Kapasitas Fiskal maka daerah akan semakin mandiri dan tidak tergantung kepada transfer dari pusat.

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sangat dipengaruhi Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan lain yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah, karena empat komponen tersebut merupakan sumber pendapatan asli daerah, dimana penerimaan PAD yang paling besar dipengaruhi oleh pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah tersebut di pengaruhi oleh pendapatan dan jumlah penduduk, dimana pendapatan disini adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto, semakin tinggi PDRB maka penerimaan Pajak daerah juga akan semakin tinggi begitu juga dengan jumlah penduduk yang dimaksud adalah penduduk yang telah bekerja dan berpenghasilan dan juga pajak daerah di pengaruhi oleh penerimaan pajak tahun sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya penelitian ini, maka kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar : Kerangka Konseptual Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas Fiskal dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat.**

**D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan teori yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Bagi Hasil dan PAD terhadap Kapasitas Fiskal di Sumatera Barat.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak, Retribusi, hasil pengolahan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah terhadap PAD di Sumatera Barat.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah penduduk, dan Pendapatan terhadap Pajak .

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara bersama-sama Pendapatan regional dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah, Semakin tinggi Pendapatan regional dan jumlah penduduk di Sumatera Barat maka penerimaan terhadap pajak daerah di Sumatera Barat akan semakin tinggi. ( $\text{sig} = 0,0000$ ). Bahwa secara bersama-sama pendapatan dan jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap Pajak daerah
2. Secara parsial dan bersama-sama pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Sumatera Barat ( $\text{sig} = 0,000$ ), Semakin tinggi pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah di Sumatera Barat maka akan meningkatkan penerimaan terhadap PAD di Sumatera Barat. Sebaliknya semakin rendah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah di Sumatera Barat maka akan menurunkan penerimaan terhadap PAD di Sumatera Barat.
3. Secara parsial dan bersama-sama variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil pada kabupaten/kota di Sumatera Barat signifikan mempengaruhi Kapasitas Fiskalnya. semakin tinggi PAD dan DBH maka

semakin tinggi pula kapasitas fiskal di Sumatera Barat berarti daerah dapat mengelola keuangan dengan baik dan tidak tergantung kepada dana dari pusat dan sebaliknya semakin rendah PAD dan Dana Bagi Hasil maka semakin rendah pula kapasitas fiskla daerah yang akan mengakibatkan daeah masih akan tergantung kepada dana transfer dari pusat (DAU). Berdasarkan kepada bukti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil meningkatkan Kapasitas Fiskal di kabupaten/kota di Sumatera Barat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Supaya PDRB mengalami peningkatan secara signifikan dan dengan meningkatnya PDRB maka akan meningkatkan Pendapatan perkapita karena pendapatan perkapita sebagai ukuran kemampuan seseorang dalam pembayaran pajak, maka disarankan kepada pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara efektif dan efisien, sebab dengan kebijakan tersebut perkembangan ekonomi (PDRB) daerah akan semakin meningkat.
2. Semua aparatur pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat supaya dapat meningkatkan sumber daya manusia agar pengelolaan pajak dan retribusi dapat dioptimalkan, sehingga penerimaan pajak dan retribusi dapat terus meningkat.

3. Semua pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat supaya terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan diikuti intensifikasi dan ekstensifikasi baik subyek dan obyek pajak yang memungkinkan untuk digali secara optimal. Karena pajak sangat mempengaruhi PAD di Sumatera Barat.
4. Semua daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan PAD sebagai salah satu penerimaan daerah juga menjadi kekuatan bagi daerah yang bersangkutan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Sebaiknya pemerintah selalu mengupayakan peningkatan terhadap komposisi penerimaan PAD, terutama pajak daerah agar memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang dapat mendorong kemandirian daerah, agar daerah tidak tergantung lagi kepada transfer dari pusat, dan diharapkan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Untuk mendorong kemandirian daerah melalui peningkatan dana Bagi Hasil (DBH), baik dana bagi hasil pajak maupun sumber daya alam pemerintah sebaiknya perlu melakukan optimalisasi Bagi Hasil Pajak melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

### **C. Keterbatasan Penelitian**

1. Referensi dari penelitian sebelumnya tidak banyak, sehingga acuan dari penelitian ini mendasarkan pada laporan keuangan yang ada.
2. Pengukuran tingkat kemandirian daerah belum ada aturan yang baku, sehingga diasumsikan dengan tingkat kemandirian yang diukur dari Kapasitas Fiskal (PAD + DBH).
3. Keterbatasan dari data yang diperoleh, seperti data dan literatur yang menjelaskan tolok ukur kemandirian daerah belum ada.
4. Agar penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif, sebaiknya tahun penelitian ini ditambah tidak hanya 3 tahun. Namun hal tersebut juga tidak lepas dari permasalahan kemudahan data yang diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2007 *Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi (studi pada kabupaten/kota se Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akutansi X Makasar.
- Brodjonegoro, Bambang Permadi. 2006. *Desentralisasi Sebagai Kebijakan Fundamental Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dan Mengurangi Kesenjangan Antar Daerah Di Indonesia*. FE UI. Jakarta.
- BPS. *Statistik Keuangan Daerah Menurut Kabupaten/Kota Sumatera Barat. 2007-2009*. Padang. BPS Sumatera Barat.
- BPS. *Sumbar Dalam Angka. 2008-2010*. Padang. BPS Sumatera Barat
- Fajrin, Frida Febriana. 2008. *Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah (studi kasus: tiga puluh provinsi di Indonesia pada periode 2001-2005)*. Skripsi. UNS. Surakarta.
- Gujarati, Damor. 2007. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Gelora Angkasa Pratama.
- Halim, Abdul, "Anggaran Daerah dan Fiscal Stress :Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia", JEBI Vol. 16, No. 4, 2001.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta :AMPYKPN.
- Haryanto, Joko T. 2005. *Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif Dengan Metode Path Analysis (Studi Antar Propinsi dan Kab/Kota di Indonesia)*. Tesis.
- Hervyra, 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah (Studi kasus Kab/Kota di Sumatera Barat)*. Skripsi. UNAND
- Istikomah, Nurul. 2009. *Analisis Kapasitas Fiskal (Fiscal Capacity) Kota Bandar Lampung Pada Era Otonomi Daerah Tahun 2001-2005*. Skripsi. UNILA. Lampung.
- Kaho, Josef Riwu. 1998. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga.